

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan teori**

##### **1. Inklusi Keuangan**

Menurut Bank Indonesia (2013), inklusi keuangan merupakan upaya dalam meniadakan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses pelayanan keuangan masyarakat. Menurut Sanjaya (2014) , inklusi keuangan bertujuan sebagai penyedia akses bagi masyarakat agar dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Inklusi keuangan adalah suatu keadaan dimana masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penggunaan layanan keuangan penduduk disuatu Negara dapat dilihat dari menabungnya masyarakat, meminjam uang, melakukan pembayaran dan mengatur resiko.

Inklusi keuangan dan akses terhadap pelayanan jasa keuangan merupakan dua hal yang berbeda. Pelaku ekonomi mungkin memiliki akses terhadap jasa keuangan tetapi tidak ingin menggunakannya. Hal ini disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi dalam menggunakan jasa keuangan. Dermiguc-kunt A et al. (2008) mengungkap lebih rinci mengenai perbedaan akses terhadap jasa keuangan dengan penggunaan

jasa keuangan. Akses ditujukan sebagai penawaran sedangkan penggunaan jasa keuangan ditentukan oleh penawaran ataupun permintaan.

Inklusi keuangan diartikan sebagai suatu kelompok individu yang menggunakan layanan jasa keuangan memiliki multidimensi, merefleksikan beragam macam layanan keuangan seperti fasilitas pembayaran, rekening, tabungan, asuransi, dan pasar modal. Rendahnya penggunaan layanan jasa keuangan bukan berarti kurangnya akses terhadap layanan keuangan melainkan masyarakat mungkin saja memiliki akses layanan tersebut akan tetapi memilih untuk tidak menggunakannya. Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya inklusi keuangan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal begitupun sebaliknya. Rendahnya inklusi keuangan menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan jasa keuangan formal yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 2. Indikator Keuangan Inklusif.

World Bank (2009) menjelaskan bahwa akses jasa keuangan dapat diukur dengan jumlah individu, rumah tangga, maupun perusahaan yang menggunakan layanan keuangan seperti menyimpan, menerima kredit, melakukan pembayaran, dan menggunakan produk keuangan lainnya dari berbagai lembaga keuangan baik yang formal maupun yang informal.

Indikator yang paling baik untuk mengukur akses jasa keuangan adalah jumlah orang yang menggunakan jasa simpanan dan jumlah orang yang menggunakan jasa pinjaman di lembaga keuangan. Namun, tidak semua negara yang memiliki data tersebut, terutama dari lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan informal. Indikator yang paling tepat digunakan untuk mengukur akses terhadap penggunaan jasa simpanan adalah jumlah rekening deposit per 1000 orang dewasa.

Beberapa penelitian telah membedakan antara konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Akses jasa keuangan diukur dengan jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu wilayah, sedangkan penggunaan diukur dengan jumlah deposit dan kredit yang disalurkan (World Bank, 2009).

### 3. Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif.

Dalam mengukur tingkat inklusi suatu wilayah maka diperlukan indeks inklusi keuangan. Beberapa peneliti mengukur inklusi keuangan dengan menghitung proporsi dari populasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap jasa keuangan formal. Studi lain juga membedakan konsep akses jasa keuangan dengan penggunaan jasa keuangan. Dimana akses jasa keuangan dapat diukur dari jumlah kantor perbankan dan jumlah ATM yang tersebar di suatu wilayah. Sedangkan penggunaan jasa keuangan dapat diukur dengan jumlah deposit serta kredit yang disalurkan. Sarma et.al (2011) mengungkapkan Indeks ini sendiri digunakan untuk mengukur

keinklusion system keungan disuatu Negara. Perhitungan ini dikembangkan menjadi 3 dimensi yaitu :

a. Penetrasi perbankan .

Penetrasi perbankan indicator utama dalam inklusi keuangan. Dimana semakin banyak penggunaanya maka semakin baik , maka dari itu system keuanga diharapkan dapat menjangkau dengan luas diantara penggunaanya. Salah satu indikatornya adalah proporsi populasi yang dimiliki rekening perbankan.

b. Ketersediaan jasa keuangan

Jasa keuangan harus tersedia bagi semua pengguna dalam suatu system keuangan yang inklusif. Ukuran ini dapat dilihat dari jumlah kantor cabang, ATM, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri ATM memiliki peranan penting bagi jasa perbankan dalam melayani kebutuhan masyarakat di jasa keuangan sehingga dengan adanya kantor cabang dan ATM, akan mempermudah masyarakat dalam menjangkau jasa keuangan.

c. Penggunaan jasa perbankan

Memiliki rekening tidak cukup untuk menunjukkan system keuangan yang inklusif. Diperlukan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya seperti kredit, deposit, pembayaran , remintasi dan transfer.

Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. *Alliance for Financial Inclusion* (2010) secara umum

mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) indikator, sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan (*Access*): kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal.
- 2) Kualitas (*Quality*): sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk-produk jasa keuangan yang tersedia bagi mereka.
- 3) Penggunaan (*Usage*): tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan jasa keuangan, lebih memfokuskan pada aspek *permanence and depth* dari layanan dan produk sector keuangan di suatu negara.
- 4) Kesejahteraan (*Welfare*): mengukur dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan.

Indeks keuangan inklusif dapat dihitung apabila masing-masing dimensi telah mempunyai nilai indeks dimensi. Untuk mengetahui indeks dari setiap dimensi ( $d_i$ ), dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$d_i = W_i \frac{(A_i - m_i)}{M_i - m_i}; i = 1, 2, 3 \dots \dots \dots$$

Dimana :

$d_i$  = dimensi ke - 1

( $d_1$  = penetrasi ,  $d_2$  = ketersediaan,  $d_3$  = pengguna)

$W_i$  = bobot yang diberikan kepada dimensi ke - ,  $0 \leq W_i \leq 1$

$A_i$  = nilai aktual dari peubah i

$M_i$  = nilai maksimum (batas atas) dari peubah i

$m_i$  = nilai minimum (batas bawah) dari peubah i

Sumber : Bintang Badriatul Ummah (2015)

Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh suatu dimensi maka semakin tinggi pula pencapaian di dalam dimensi tersebut. Untuk menghitung indeks setiap dimensi diperlukan bobot. Bobot ditentukan berdasarkan seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi keuangan inklusif. Selain memerlukan bobot, perhitungan indeks keuangan inklusif memerlukan batas atas dan bawah dari masing-masing indikator. Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap.

#### 4. Faktor yang Mempengaruhi Keuangan Inklusif.

Penelitian ini menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IIK) sebagai variabel dependen. Indeks keuangan inklusif merupakan ukuran untuk tingkat keuangan inklusif. Indeks keuangan inklusif akan dipergunakan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif di lima Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2018. Perhitungan indeks keuangan inklusif dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh Ummah dkk., (2015) dan Atikah dan Ma'ruf (2016).

Variabel independen dari penelitian ini diadopsi dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

a. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi perekonomian di suatu negara dalam periode tertentu melalui data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga kostan maupun harga berlaku. Produk domestik bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih luas atau skala nasional sedangkan produk domestik regional bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih kecil atau skala regional.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian negara, antara sektor satu dengan sector lainnya saling membutuhkan, baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut dengan pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku maka hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.

Pendapatan per kapita nominal adalah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Sedangkan pendapatan per kapita riil adalah pendapatan per kapita yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. GDP Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan.

#### b. Angka Melek Huruf

Melek huruf adalah kemampuan menulis dan membaca. Lawan kata dari melek huruf adalah buta huruf atau tuna aksara. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin, huruf arab dan huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau dituliskannya. Melek huruf memungkinkan manusia melakukan lompatan kuantum dalam peradaban karena dengan melek huruf masyarakat luas tercerahkan atau paling tidak

memiliki akses yang luas terhadap sumber informasi bahkan sumber ilmu pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh segelintir orang.

Angka melek huruf berkisar antara 0-100, dimana tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduk untuk memperoleh informasi melalui kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat diteliti lagi seberapa besar penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya diberbagai bidang kehidupan. Selain itu, angka melek huruf dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf, pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan lainnya.

Melek huruf juga penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan dalam mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Kondisi ini juga mempermudah penerimaan informasi dari berbagai sumber salah satunya adalah lembaga keuangan. Informasi yang

diterima akan mudah diolah dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan diri. Dengan demikian melek huruf akan mendukung program keuangan inklusif yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

### c. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Infrastruktur fisik dan sosial dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur antara lain dapat berupa fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal waduk, tanggul, pengolahan limbah, pelistrikan, telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional.

Infrastruktur dikelompokkan menjadi enam kelompok, yaitu kelompok jalan (jalan, jalan raya, jembatan), kelompok pelayanan transportasi (transit, jalan rel, pelabuhan, bandar udara), kelompok air (air bersih, air kotor, semua sistem air, termasuk jalan air), kelompok manajemen limbah (sistem manajemen limbah padat), kelompok bangunan dan fasilitas olahraga luar, dan kelompok produksi dan distribusi energi (listrik dan gas).

Dalam pasal 1 ayat 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, memberikan definisi bahwa jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pembangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan infrastruktur fisik yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang memegang peranan penting dalam sektor perhubungan terutama untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan potensi daerah. Kondisi jalan yang baik akan menjadi tolak ukur dari perekonomian dan akan memudahkan distribusi barang dan jasa serta kelancaran investasi. Pada umumnya jalan aspal merupakan salah satu infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan yang baik dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada pada suatu negara akan memudahkan akses pada lembaga keuangan. Untuk itu dalam penelitian ini infrastruktur yang digunakan adalah jumlah keseluruhan jaringan aspal yang ada di masing-masing Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### d . Pengangguran

Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan keuangan inklusi adalah pekerja (Sarma dan Pias, 2011). Pekerja adalah faktor penting yang mempengaruhi keuangan inklusif. Pertama, peningkatan lapangan kerja baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan

pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal sehingga meningkatkan keuangan inklusi. Kedua, pekerjaan formal secara otomatis menghubungkan karyawan dengan sistem keuangan formal melalui pembayaran upah dengan *Automated Cash Transfer* (ACT). Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan, akan sedikit kemungkinan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan (Lenka dan Barik, 2018).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, beberapa literatur tentang keuangan inklusif adalah :

**TABEL 2.1**

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil Penelitian
1.	Sarma dan Pais (2011)	Financial Inclusion and Development : A Cross Country Analysis	Variabel Independennya adalah dari socio economi yaitu GDP , jumlah, populasi penduduk, tingkat pengangguran dan rasio gini. Dari infrastuktur yaitu panjang jalan aspal, penggunaan telepon,surat kabar, pengguna tv, radio , computer dan internet. Dari perbankan yaitu NPA, CAR, <i>asset foreign</i> , <i>asset government</i> dan <i>interest rate</i>	Hasil penelitian menunjukkan dari socio economi GDP dan rasio gini berpengaruh secara signifikan terhadap inklusi keuangan sedangkan populasi penduduk dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Dari infrastuktur , panjang jalan, penggunaan telepon dan internet berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan sedangkan pengguna computer, surat kabar dan radio tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.Dari perbankan, NPA, CAR dan <i>Asset Foreign</i> memiliki pengaruh signifikan sedangkan <i>Asset government</i> dan <i>interest rate</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan.

2.	Chithra dan Selvam (2013)	Determinants of Financial inclusion: an Empirical study on the inter state variations in India	Faktor sosial-economi, pendapatan, Pengangguran literasi dan populasi desa. Faktor perbankan, deposit dan kredit signifikan terhadap keuangan inklusi. Faktor infrastruktur, jalan, telepon, Koran, computer dan internet	Hasilnya faktor sosial-economi, pendapatan, literasi dan populasi desa signifikan terhadap Keuangan Inklusi. Faktor perbankan, deposit dan kredit signifikan terhadap keuangan inklusi. Faktor infrastruktur, jalan, telepon, computer dan internet berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusi. Namun pengangguran, koran, rasio credit-deposit tidak signifikan terhadap Keuangan Inklusi
3.	Bintan Badrriatul Ummah (2013)	Analisis Keterkaitan Inklusi keuangan dengan pembangunan di Asia	Indeks Inklusi Keuangan sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah PDRB PerKapita, Populasi dan pengangguran	Hasil penelitian menunjukkan PDRB PerKapita dan populasi mempengaruhi inklusi keuangan sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.
4.	Ummah dkk., (2015)	Analisis keuangan inklusif dan pemerataan pendapatan di Indonesia.	Indeks Keuangan inklusif sebagai variabel dependen dan variabel independen menggunakan faktor sosial ekonomi (PDRB, pengangguran, melek huruf, rasio gini) serta infrastruktur (rasio jalan, internet dan ponsel).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi positif tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dengan keuangan inklusif memiliki hubungan satu arah dimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi 5. Keuangan inklusif di Indonesia tetapi tidak sebaliknya.
5.	Atikah (2016)	Analisis Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.	Indeks Keuangan Inklusif sebagai variabel dependen, sedangkan PDRB, Angka Melek Huruf dan Rasio Jalan sebagai variabel independen.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka melek huruf dan rasio jalan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan

6.	David et al., (2018)	Empirical Analysis of the Determinants of Financial Inclusion in Nigeria : 1990-2016	Variabel dependennya adalah inklusi keuangan dan Variabel independennya yaitu GDP per kapita, kredit dan internet	Hasil dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa GDP per kapita, kredit dan internet memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.
7.	Le et al., (2019)	Determinants of Financial Inclusion : comparative study of Asian countries	Variabel dependennya adalah inklusi keuangan dan Variabel independennya yaitu GDP per kapita, melek huruf, pengangguran, inflasi, populasi, interest rate dan internet	Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat Keuangan Inklusif di ASIA dipengaruhi oleh pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan, tingkat melek huruf berpengaruh positif dan signifikan, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel inflasi, populasi, internet, <i>interest rate</i> tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan.
8.	Indah Khorunnisa (2019)	Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia	Variabel dependennya adalah tingkat inklusif keuangan dan variabel independennya adalah PDRB PerKapita, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, ketimpangan pendapatan dan rata-rata lama sekolah	Hasil penelitiannya adalah PDRB Perkapita, tingkat pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan pengaruh negative dan tidak signifikan terhadap inklusi keuangan, persentase penduduk miskin memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan sedangkan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan

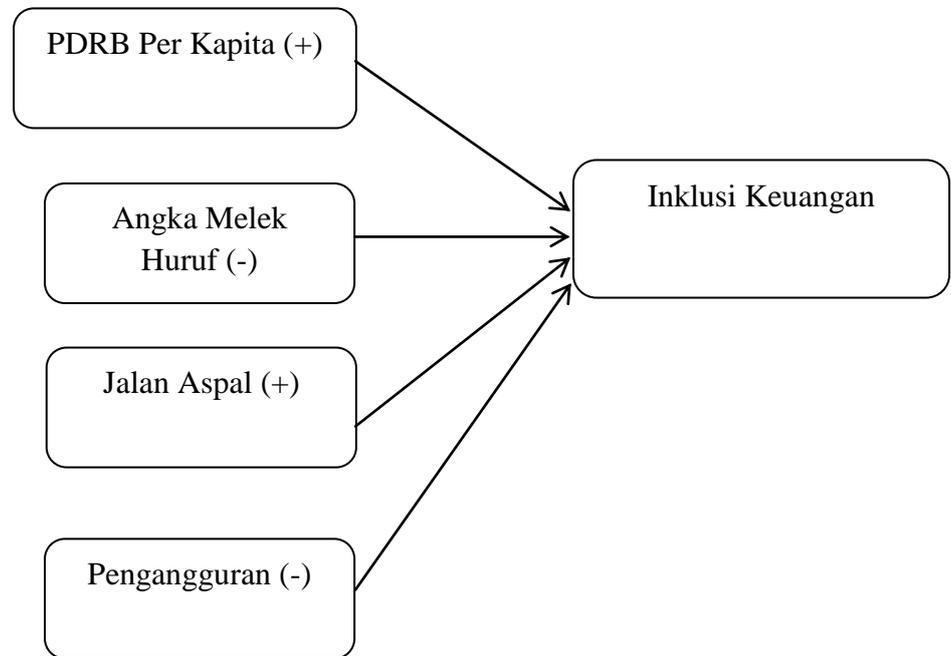
9.	Yana Raudhtul Jannah dan David Kaluge (2019)	Analisis Variabel sosial ekonomi terhadap Tingkat Inklusi Keuangan Negara Asia tahun 2010-2015	Variabel dependentnya adalah tingkat inklusi keuangan dan Variabel independentnya adalah GDP PerKapita, tingkat pengangguran, jumlah penduduk di desa	Hasil Penelitiannya GDP per Kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan sedangkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk desa berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan
10.	Annisa, dkk. (2019)	Faktor – Faktor Penentu Inklusi Keuangan di Indonesia periode tahun 2012-2016	Variabel Independentnya inflasi, GDP PerKapita, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dn Non Performing Loan (NPL)	Hail penelitian menunjukkan GDP PerKapita dan NPL berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi sedangkan UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inklusi keuangan
11.	Ariyani dan Ma'ruf (2019)	Financial of Inclusion and Achievements Sustainable Developments Goals (SDGs) in ASEAN	Variabel dependentnya adalah tingkat inklusi keuangan dan Variabel independentnya adalah angka melek huruf dan GDP.	Indeks Inklusi Keuangan tentang pencapaian SDGs dalam aspek kemiskinan di ASEAN memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Tingkat melek huruf memiliki dampak positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di ASEAN. Semakin baik tingkat melek huruf suatu negara, semakin baik akses mereka ke lembaga keuangan. Tingkat pendapatan orang-orang di ASEAN memiliki efek positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, semakin besar akses penduduk ke lembaga keuangan.

### **C. Hipotesis**

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Tingkat Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sesuai dengan standar nasional
2. Diduga PDRB mempunyai pengaruh positif terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Diduga Angka melek Huruf mempunyai pengaruh negatif terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Diduga jalan aspal mempunyai pengaruh positif terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Diduga Pengangguran mempunyai pengaruh positif terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta

#### D. Model Penelitian



**GAMBAR 2.1.**

Kerangka Pemikiran

Dari gambar 2.1, penulis ingin mengkaji apakah PDRB Per Kapita, Angka Melek Huruf, Infrastruktur Jalan Aspal dan Pengangguran memiliki pengaruh terhadap keuangan inklusif. Untuk pengujian ini menggunakan analisis data panel.